

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup. Menurut Malayu S.P Hasibuan (2002:185) Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap (material dan nonmaterial) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan, bertujuan mempertahankan kondisi fisik dan mental karyawan, agar produktivitas kerja karyawan meningkat. Sehingga ada timbal balik atas jasa pekerja yang telah di berikan kepada perusahaan, semakin tinggi jam kerja pekerja dan semakin banyak produksi yang dihasilkan maka semakin tinggi pula upah yang diterima (Ibrahim, 2021).

Berdasarkan indikator menurut Badan Pusat Statistik tahun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan di Provinsi Lampung menggunakan 8 pendekatan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi (Sugiharto, 2017).

Kualitas hidup tercermin dari pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang dilihat dari tingkat pendapatan. Kesejahteraan tidak terlepas dari

kasus kemiskinan, karena jika berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sebaliknya meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat (Bilqis, 2021).

Dari 38 provinsi yang ada Indonesia sangat disayangkan bahwa provinsi Lampung saat ini berada pada posisi ke 11 sebagai provinsi termiskin di Indonesia dan berada di posisi ke 4 provinsi termiskin di pulau Sumatera. Kemiskinan ini merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan suatu daerah (metro tv 17/04/23). Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di provinsi Lampung, maka dapat terlihat dari jumlah penduduk miskin di Lampung sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di Lampung Tahun 2016-2020

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lampung Barat	67.880	65.230	60.180	60.270	42.200
Tanggamus	92.750	89.360	85.640	85.020	81.600
Lampung Selatan	177.740	171.410	162.970	161.790	157.700
Lampung Timur	189.460	182.210	172.210	170.730	170.100
Lampung Tengah	187.000	180.230	162.810	161.550	164.400
Lampung Utara	155.810	149.950	142.010	140.730	140.400
Way Kanan	72.510	69.730	65.180	64.500	63.100
Tulang Bawang	40.750	38.950	33.720	36.830	44.200
Pesawaran	77.050	74.260	74.600	74.010	75.400
Bandar Lampung	121.580	117.350	102.750	102.700	100.800
Metro	19.000	18.340	17.080	16.950	16.200

Provinsi	1.201.530	1.156.660	1.079.780	1.075.080	1.056.100
Lampung					

Sumber : BPS, data dan informasi kemiskinan, 2020

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir berada di Kota Lampung. Dapat dilihat dari tabel 1.1 daerah yang paling tinggi jumlah penduduk miskin adalah kabupaten Lampung Timur dengan jumlah 170.100 jiwa pada tahun 2020 sedangkan yang terendah terdapat di kota Metro sebesar 16.200 jiwa di tahun 2020 dengan total semua kabupaten kota di provinsi Lampung 10.56.100 jiwa pada tahun 2020. Hal tersebut memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Pada setiap tahunnya sumbangan GKM terhadap GK sebesar 18,35 persen rata-rata pertahunnya. Dengan kata lain peningkatan Garis Kemiskinan dipicu dipicu karena kenaikan harga yang lebih tinggi pada komoditi non makanan dibandingkan komoditi makanan.

Kinerja keuangan daerah sendiri dapat diukur melalui beberapa rasio diantaranya adalah rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian belanja dan rasio efektivitas. Rasio pertama yang dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah rasio kemandirian. Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah merupakan rasio yang menunjukkan sejauhmana kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan kegiatan dan urusan dalam Pemerintahannya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menjelaskan tingkat kemampuan pada daerah tertentu saat menganggarkan kegiatan pemerintah, pelayanan dan pembangunan ke masyarakat yang sudah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang digunakan pada daerah. Rasio kemandirian Keuangan Daerah dijelaskan pada besarnya Pendapatan Asli Daerah yang membandingkan dengan pendapatan Daerah yang asalnya dari sumber lain (Pendapatan Transfer) ialah Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Bagi

hasil pajak, Alokasi khusus, Dana alokasi umum, dana darurat dan pinjaman (Riswati, 2022).

Rasio kedua yang dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan keuangan daerah adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan maupun belanja secara positif maupun negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Riswati, 2022).

Rasio ketiga yang dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah rasio keserasian belanja. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja Total Realisasi Belanja Daerah dan Total Realisasi Pendapatan Daerah pelayanan publik secara optimal (Halim, 2007:235). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja investasi (belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Rasio terakhir yang dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah rasio efektivitas. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio ini mampu menyerap anggaran setiap tahunnya

sehingga persentasenya lebih dari 100%, ini membuktikan baiknya perencanaan yang menjadi tolak ukur dalam merealisasikan anggaran pendapatan asli daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Sakti, 2023) pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai interventing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan Rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan rasio pengukuran yaitu rasio efektivitas dan studi kasus yang dilakukan terletak pada Provinsi Lampung dan tidak menggunakan variable intervening pada penelitian ini. Berdasarkan fenomena dan latar belakang maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Empiris Pada Provinsi Lampung)**”

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas meneliti kesejahteraan masyarakat Index Pembangunan Manusia (IPM) melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini Hanya membahas bagaimana Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penyusun dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
2. Apakah Rasio Pertumbuhan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
3. Apakah Rasio Keserasian Belanja berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat?

4. Apakah Rasio Efektivitas berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh rasio kemandirian terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh rasio pertumbuhan terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh rasio keserasian belanja terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh rasio efektivitas terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama, dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca menyediakan informasi terkait kinerja keuangan daerah dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Dapat digunakan bagi penulis, bagi instansi-instansi atau pihak lain.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kontribusi sebagai bahan masukan dan gambaran tentang kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori teori yang mendukung penelitian ini, seperti grand theory. penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variable populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan bahasan mengenai factor factor yang mempengaruhi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab in berisi simpulan atas penelitian serta saran saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan refrensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN